

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional dalam suatu bangsa untuk pemerataan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan dan stabilitas nasional. Dalam pembangunan nasional seperti ini diharapkan pemerintah lebih menekankan pada unsur pemerataan karena pemerataan merupakan unsur utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan adanya lembaga keuangan pemerintah dapat melakukan pemerataan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan dan stabilitas nasional akan menjadi kenyataan, karena fungsi dari lembaga keuangan sendiri adalah memberikan modal usaha kepada masyarakat, sekarang banyak masyarakat yang ingin membuka usaha sendiri peran lembaga keuangan sangat membantu dalam membangun serta memajukan usaha tersebut.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan harus cermat dalam memberikan modal kepada masyarakat yang mengajukan permintaan pinjaman, hal ini dikarenakan pemberian modal tersebut tidak dapat dilunasi dengan tepat waktu baik pokok pinjaman maupun bunga yang telah ditentukan. Seperti terjadi pada tahun 1998 puncak krisis ekonomi, bank sebagai lembaga keuangan pemerintah seharusnya lebih cermat dan dengan adanya krisis ekonomi ini menurunkan kesejahteraan rakyat.

Banyak pihak mengkritisi bahwa sistem perekonomian nasional masih belum cukup memihak dan memberikan kesempatan kepada UMKM, terutama dari sisi permodalan. Perbankan dianggap masih setengah hati dalam menyalurkan kredit

kepada UMKM .Salah satu indikator dari kondisi tersebut adalah kesulitan UMKM untuk mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan formal terutama perbankan. Indikasi dari ketidakmampuan UMKM tersebut terlihat dari rendahnya alokasi dana atau kredit dari bank-bank umum untuk UMKM. Padahal penyaluran kredit oleh perbankan diharapkan menjadi mesin pendorong perekonomian, tidak terkecuali bagi UMKM.Hal ini dikarenakan adanya harapan bahwa UMKM dapat memainkan perannya dalam perekonomian Indonesia secara maksimal (Bank Indonesia, 2009).

Masalah lain juga timbul ketika kriteria perbankan dalam menentukan batasan UMKM yang digunakan adalah berdasarkan realisasi pinjaman yang diberikan sehingga semua peminjam yang mempunyai pinjaman di bawah 50 juta rupiah dikelompokkan sebagai usaha mikro sedangkan pinjaman 50-500 juta rupiah dinyatakan sebagai usaha kecil. Kriteria ini cenderung bias karena banyak pinjaman yang bukan tergolong pinjaman UMKM, dengan kriteria tersebut digolongkan sebagai pinjaman UMKM. Sebagai contoh, misalnya ada yang meminjam untuk membeli mobil melalui leasing seharga 150 juta rupiah otomatis dapat digolongkan sebagai pinjaman usaha kecil (Syarif, 2007).

Sedangkan dari segi permintaan, hasil penelitian dari Bank Indonesia mengemukakan bahwa kelompok UMKM memang tidak atau kurang berminat untuk memperoleh bantuan dana dari perbankan. Hanya 32% dari mereka yang masuk dalam kelompok usaha mikro dan usaha kecil yang menyatakan memerlukan bantuan modal dari pinjaman bank dan hanya 76% dari 32% yang membutuhkan tersebut menyatakan pernah meminta pinjaman kredit dari perbankan. Hal ini disebabkan karena UMKM lebih memilih meminjam dari pelepas uang (rentenir) karena persyaratannya lebih mudah daripada meminjam dari bank. Padahal bunga pinjaman dari pelepas uang mencapai 5% sampai dengan 40% per bulan, atau 60 sampai dengan 480% per tahun (Syarif, 2007).

Pendidikan saat ini memiliki peranan yang sangat penting dalam sumber daya manusia yang berkualitas maka dibutuhkan pendidikan, karena pendidikan dianggap mampu menghasilkan tenaga kerja yang bermutu tinggi, mempunyai pola pikir dan cara bertindak yang modern. Sumber daya manusia seperti inilah yang diharapkan mampu menggerakkan roda pembangunan ke depan, Ini membuktikan bahwa semakin tahun pendidikan sangat penting dalam pengembangan usaha, karena melalui pendidikan tercipta sumber daya yang berkualitas baik dalam pembukuan, penguasaan teknologi, serta manajemen yang bagus. Selain dari pendapatan dan juga pendidikan, lama usaha juga mempengaruhi dalam pemberian kredit apakah dengan semakin lama usaha tersebut berdiri pendapatan meningkat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan kredit.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Analisis Pengaruh Pendapatan, Tingkat Pendidikan, Lama Usaha Terhadap Pemberian Kredit UMKM (Studi Pada PD BPR Kabupaten Madiun)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan berpengaruh positif terhadap pemberian kredit UMKM?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pemberian kredit UMKM?
3. Apakah lama usaha berpengaruh positif terhadap pemberian kredit UMKM?
4. Apakah pendapatan, Tingkat pendidikan, Lama usaha berpengaruh positif terhadap pemberian kredit UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan terhadap pemberian kredit UMKM
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan terhadap pemberian kredit UMKM
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lama usaha terhadap pemberian kredit UMKM
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan, tingkat pendidikan, lama usaha terhadap pemberian kredit UMKM

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis
Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang peranan kredit yang di salurkan bank
2. Bagi akademis
Dapat digunakan sebagai sumber informasi tentang peran dan fungsi manajemen keuangan , khususnya dalam salah pemberian kredit kepada usaha kecil dan menengah.
3. Bagi bank
Sebagai bahan pertimbangan apabila nasabah hendak memperoleh kredit.
4. Bagi usaha kecil dan menengah
Penelitian ini diharapkan mampu membantu usaha kecil dan menengah dalam meningkatkan pendapatan dengan pinjaman kredit.